

ABSTRAK

RABI'AH, NPM: 2022490, Judul " IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BALANGAN" dibawah bimbingan **Bapak Drs. H. Arpandi, M. AP.** sebagai Pembimbing I, dan **Bapak H. Yusran Fahmi, S.IP., M.AP.** sebagai Pembimbing II.

Implementasi kebijakan kearsipan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Balangan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam mengelola arsip yang bersifat strategis dan rahasia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai fenomena permasalahan dalam pelaksanaannya, khususnya pada Dinas Sosial Kabupaten Balangan. Fenomena yang muncul antara lain belum optimalnya penyampaian kebijakan secara berkelanjutan, belum adanya SOP khusus pengelolaan arsip terjaga, rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan arsip terjaga, keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan, tidak tersedianya arsiparis, serta lemahnya komitmen pelaksana dalam memandang kearsipan sebagai fungsi strategis organisasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Lokasi penelitian adalah Dinas Sosial Kabupaten Balangan. Teknik analisa digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketentuan, triangulasi dan *membercheck*. Analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan teori George C. Edwards III yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga pada Dinas Sosial Kabupaten Balangan belum berjalan optimal. Pada variabel komunikasi, transmisi kebijakan belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemahaman pegawai terhadap kewajiban pengelolaan dan pelaporan arsip terjaga masih rendah. Pada variabel sumber daya, pelaksanaan kebijakan terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kearsipan, tidak tersedianya arsiparis, belum adanya anggaran khusus kearsipan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti ruang arsip dan perangkat penyimpanan. Pada variabel disposisi, masih ditemukan rendahnya komitmen dan kesadaran pelaksana dalam mengelola arsip terjaga karena kearsipan dipandang sebagai tugas administratif tambahan. Sementara itu, pada variabel struktur birokrasi, belum tersedianya SOP tertulis yang jelas menyebabkan proses identifikasi, pemberkasan, dan pelaporan arsip terjaga belum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar Dinas Sosial Kabupaten Balangan meningkatkan intensitas sosialisasi kebijakan kearsipan, menyusun dan menetapkan SOP pengelolaan arsip terjaga, menyediakan arsiparis serta sarana dan prasarana pendukung, mengalokasikan anggaran khusus kearsipan, serta memperkuat komitmen pimpinan dan pegawai dalam pengelolaan arsip terjaga agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

RABI'AH, NPM: 2022490, Title "IMPLEMENTATION OF REGENT REGULATION NUMBER 67 OF 2023 CONCERNING MANAGEMENT OF MAINTAINED ARCHIVES IN THE SOCIAL SERVICES OF BALANGAN REGENCY" under the guidance of Mr. Drs. H. Arpandi, M. AP. as Supervisor I, and Mr. H. Yusran Fahmi, S.IP., M.AP. as Supervisor II.

Implementation of archival policies is a crucial part of achieving orderly administration and accountability in regional government administration. The Balangan Regency Government has enacted Regent Regulation Number 67 of 2023 concerning Secure Archives Management as a guideline for regional officials in managing strategic and confidential archives. However, in practice, various problems remain in its implementation, particularly at the Balangan Regency Social Service. The emerging phenomena include suboptimal continuous policy delivery, the absence of specific SOPs for archive management, low compliance with archive reporting obligations, limited archival facilities and infrastructure, the unavailability of archivists, and weak commitment by implementers to viewing archives as a strategic organizational function.

This research employed a qualitative, descriptive approach. The research location was the Balangan Regency Social Service. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation, with 12 informants selected through purposive sampling. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was tested through source and technique triangulation. The analysis of policy implementation in this study utilized George C. Edwards III's theory, which encompasses communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

The results of the study indicate that the implementation of Regent Regulation Number 67 of 2023 concerning the Management of Secure Archives at the Social Service of Balangan Regency has not been optimal. In terms of communication, policy transmission has not been conducted consistently and continuously, resulting in a low level of understanding among employees regarding secure archive management and reporting obligations. In terms of resources, the implementation is constrained by limited human resources with archival competence, the absence of archivists, the lack of a dedicated archival budget, and inadequate supporting facilities and infrastructure. In terms of disposition, the commitment and awareness of implementers in managing secure archives remain low, as archival tasks are perceived merely as additional administrative duties. Meanwhile, in terms of bureaucratic structure, the absence of clear and standardized written SOPs has caused the processes of identification, filing, and reporting of secure archives to be inconsistent with existing regulations.

Based on these research results, it is recommended that the Balangan Regency Social Service increase the intensity of dissemination of archival policies, develop and establish SOPs for managing secure archives, provide archivists and supporting facilities and infrastructure, allocate a dedicated budget for archives, and strengthen the commitment of leaders and employees to maintaining secure archives to ensure effective and sustainable policy implementation.